



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3, Ilir Timur I Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30126  
Telepon : (0711) 352388, Laman : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id), Pos-el : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id)

Palembang, 11 Maret 2025

Nomor : 508.123/0548/III/Diskominfo/2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Update Daftar Informasi Publik (DIP)  
PPID Pelaksana Perangkat Daerah  
Provinsi Sumsel Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
selaku Atasan PPID Pelaksana Perangkat Daerah

di Palembang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 137/KIP/II/2025 perihal Evaluasi dan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik. Bersama ini diminta kepada Saudara sebagai berikut :

1. Menyampaikan Update Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 baik data dan informasi Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
2. Susunan Daftar Informasi Publik (DIP) ini diperbaharui setiap tahun dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017.
3. Membuat Website PPID Perangkat Daerah yang terintegrasi dan menjadi menu utama pada Website Perangkat Daerah.
4. Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 untuk diumumkan dan diupload di Website PPID Perangkat Daerah dan terintegrasi ke Website PPID Pemerintah Provinsi Sumsel (<http://ppid.sumselprof.go.id>).
5. Menyampaikan dan memberikan data Pengadaan Barang dan Jasa baik Konstruksi maupun non konstruksi dengan Nilai Tertinggi Tahun 2025 dalam LPSE masing-masing 1 (satu) paket.

Untuk *update* Daftar Informasi Publik (DIP) disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *diupload* pada Website PPID/Website Perangkat Daerah paling lambat Tanggal 26 Maret 2025 kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, *contact person* Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik Sdr. Azim Baidillah, Wa. 082279973773.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel  
Selaku Atasan PPID Utama Pemprov.Sumsel,



Edward Candra



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Ilir Timur I Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30126  
Telepon : (0711) 352388, Laman : www.sumselprov.go. Pos-el : sumsel@sumselprov.go.id

Lampiran Surat Nomor *500/124/LS48* /II/Diskominfo/2025  
Perihal : Update Daftar Informasi Publik ( DIP ) PPID  
Pelaksana Perangkat Daerah Tahun 2025

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

### 1. DIP untuk seluruh PPID Pelaksana Perangkat Daerah

#### 1. Profil Perangkat Daerah :

- Informasi Domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta kantor unit-unit dibawahnya.
- Struktur Organisasi, gambaran umum satuan kerja dan Profil singkat Pejabat Struktural.
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan.

#### 2. Ringkasan informasi program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan :

- Nama dan Program Kegiatan.
- Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang bisa dihubungi.
- Target dan/atau capaian program dan kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan.
- Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas.
- Informasi khusus lainnya terkait langsung dengan hak-hak masyarakat.
- Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat.

#### 3. Ringkasan informasi tentang Kinerja berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang berjalan beserta capaiannya.

#### 4. Ringkasan Laporan Keuangan :

- Rencana dan laporan realisasi anggaran.
- Neraca.
- Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Daftar aset dan investasi.

#### 5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Tahap Perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- Tahap Pemilihan, meliputi
  - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
  - 3) Spesifikasi Teknis;
  - 4) Rancangan Kontrak;
  - 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
  - 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
  - 7) Daftar Kuantitas dan Harga;
  - 8) Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
  - 9) Gambar Rancangan Pekerjaan;
  - 10) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 11) Dokumen Penawaran Administratif;

- 12) Surat Penawaran Penyedia;
  - 13) Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 14) Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  - 15) Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
  - 16) Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
  - 17) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
  - 18) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
  - 19) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - 20) Surat Perjanjian Kemitraan;
  - 21) Surat Perjanjian Swakelola;
  - 22) Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
  - 23) Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- Tahap Pelaksanaan, meliputi :
    - 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
    - 2) Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
    - 3) Surat Perintah Mulai Kerja;
    - 4) Surat Jaminan Pelaksanaan;
    - 5) Surat Jaminan Uang Muka;
    - 6) Surat Jaminan Pemeliharaan;
    - 7) Surat Tagihan;
    - 8) Surat Pesanan E-purchasing;
    - 9) Surat Perintah Membayar;
    - 10) Surat Perintah Pencairan Dana;
    - 11) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
    - 12) Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
    - 13) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
    - 14) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
    - 15) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
14. Menyiapkan Layanan dan Akses bagi penyandang Disabilitas
  15. Update Website Perangkat Daerah dan Website PPID Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Website Pemprov. Sumsel dan Website PPID Provinsi Sumsel.

## 2. DIP tambahan bagi Perangkat Daerah tertentu :

### PPID BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Ringkasan APBD Pemprov Sumsel Tahun 2025
2. Ringkasan Laporan Kinerja Badan Publik (LAKIP) Tahun 2024
3. Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit :
  - Rencana dan laporan realisasi anggaran.
  - Neraca.
  - Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - Daftar aset dan investasi.

4. Peraturan Daerah APBD Provinsi Sumsel
5. Ringkasan RKA/DPA Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dan PPKD Tahun 2025 (Nama Kegiatan dan jumlah anggaran )
6. Opini BPK RI Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Terakhir
7. KUA dan PPAS APBD Pemprov Sumsel Tahun 2025 berikut isinya
8. Data Perbendaharaan dan Inventaris Pemprov. Sumsel
9. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun 2025
10. Realisasi Penyerapan Penggunaan Keuangan Tahun 2024 secara *real time*.
11. SOP pedoman pengelolaan keuangan Pemprov. Sumsel

#### **PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

1. Profil pimpinan badan Pemrov Sumsel selaku badan publik mulai dari profil Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Assisten, Staf ahli Gubernur, pejabat eselon II, III, dan IV.
2. LHKPN Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024
3. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang kepegawaian
4. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemprov. Sumsel Tahun 2024

#### **PPID BAPPEDA**

1. Ringkasan Renstra dan Renja Pemprov. Sumsel Tahun 2025
2. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemprov. Sumsel Tahun 2025

#### **PPID INSPEKTORAT**

1. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik (SOP Pengaduan Masyarakat)
2. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan (SOP Tata Cara Penyalahgunaan Wewenang)
3. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya

#### **PPID BIRO ORGANISASI**

1. LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
2. Survey Kepuasan Masyarakat terkait kebijakan dan pelayanan publik

#### **PPID BIRO HUKUM DAN HAM**

1. Informasi Produk Hukum tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Pemprov. Sumsel
2. Dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan/kebijakan/keputusan yang telah ditetapkan dalam rentan waktu 2024-2025 (naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat dll)
3. Rancangan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Pemprov. Sumsel
4. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan pemprov. Sumsel
5. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya

#### **PPID HUMAS DAN PROTOKOL**

1. Struktur Organisasi Pejabat Pemprov. Sumsel Tahun 2025
2. Kalender kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

#### **PPID DINAS KESEHATAN**

1. Informasi Publik yang Berkaitan Dengan Penanganan Emergency Respon Terhadap Kedaruratan (Misal informasi Ambulan, informasi ketersediaan bed, layanan Online tempat Karantina)
2. Menyiapkan layanan akses bagi penyandang Disabilitas Tuna Rungu, Tuna Wicara dan difabel lainnya.

#### **PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dari:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. peringatan bencana;
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
  - f. lokasi evakuasi; dan
  - g. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. Informasi/Pengumuman tentang ketenagakerjaan/rekrutmen tenaga kerja'

#### **PPID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

1. Menyampaikan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Pemprov. Sumsel, antara lain :
  - a. Pengamatan Gejala Bencana
  - b. Analisis hasil dari Pengamatan Gejala Bencana
  - c. Pengambilan Keputusan oleh pihak yang berwenang
  - d. Peringatan Bencana
  - e. Pengambilan Tindakan dari masyarakat
  - f. Lokasi Evakuasi
  - g. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi

#### **PPID BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

1. Surat-surat perjanjian badan publik dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa berikut dokumen pendukung
2. Daftar serta hasil-hasil penelitian serta Pigam HAKI Pemprov. Sumatera Selatan Terbaru Tahun 2023-2024